

# OPOSISI TIDAK IDENTIK MELAWAN ARUS<sup>1</sup>

Oleh Nurcholish Madjid

Label oposisi, jika diterapkan dalam konstelasi politik di negeri ini, khususnya dalam sistem kepartaian kita, selalu bernada negatif. Padahal, hakekat oposisi itu, sebagai *check and balance*, pengawasan dan pengimbangan. Jadi partai oposisi itu wujud dari pengakuan adanya perbedaan pandangan. Pikiran perihal perlunya partai oposisi di Indonesia, secara intens digulirkan Nurcholish Madjid. Dan berikut ini petikan wawancara wartawan Tabloid *Detik* (almarhum) Mahmud F. Rakasima, Zulfikri, dan Nurrahmad dengan Nurcholish Madjid.

**Penilaian Anda terhadap keterbukaan Pak Harto minta dikritik?**

Saya melihat segi positif dari permintaan Pak Harto untuk dikoreksi. Bahwa ini merupakan bagian dari pertumbuhan kebangsaan kita terutama di bidang politik. Memang kita juga harus mengakui bahwa ada kemajuan dari pembangunan ekonomi yang berjalan dengan lancar dan diakui dunia internasional. Tapi juga tidak mungkin untuk ditutup-tutupi bahwa ada ketertundaan dalam pembangunan politik. Barangkali kalau disebut gagal, mungkin *sib*

---

<sup>1</sup> Tabloid *DETIK*, "Oposisi Tak Identik Menentang Terus", No. 025 TAHUN XVII, 25-31 Agustus 1993. Pewawancara Mahmud F. Rakasima, Zulfikri dan Nurrahmad.

tidak, tetapi kalau pembangunan politik terus tertunda, bisa jadi kegagalan pada akhirnya.

Padahal yang disebut merdeka itu lebih banyak politiknya. Kita menentang penjajah karena penjajahan itu merampas kemerdekaan politik kita. Kebetulan penjajahan itu asing, ya Belanda maupun Jepang.

### **Pembangunan politik perlu mendapat prioritas?**

Ya. Bahkan perlu mendapat perhatian yang serius. Apalagi Pak Harto sudah memberi isyarat menuju ke sana. Dan itu harus disambut dengan baik.

### **Misalnya apa?**

Yakni persoalan *basic* mengenai letak perbedaan pendapat. Banyak orang bilang soal itu bukan baru lagi. Tapi pernyataan Pak Harto bisa dikembangkan menuju pengakuan akan hak berbeda pendapat. Jadi bukan hanya perbedaan pendapat itu absah atau nyata dan tidak mungkin diingkari. Tapi diberikannya pengakuan pada rakyat untuk berbeda pendapat dan hak untuk tidak setuju, *right to dissent*.

Termasuk tidak setuju terhadap penyimpangan yang dilakukan pemerintah. *Nah*, mungkin karena keharusan kehidupan politik nasional, kita harus tunduk. Tapi ketundukan itu dengan *reserve* bahwa suatu saat penyimpangan itu harus diubah. Dan harus ada sikap seperti itu.

Di negara yang sudah maju demokrasinya, mekanismenya sudah jalan. Misalnya pergantian kubu Partai Republik oleh kubu oposisi dari Partai Demokrat di Amerika Serikat. Meski Partai Republik tidak setuju dengan pemerintahan Partai Demokrat, namun apa yang telah ditetapkan oleh Partai Demokrat, orang Republik itu harus tunduk.

*Nah*, sikap ketidaksetujuan ini perlu untuk kemungkinan memberikan alternatif di masa depan. Saya menilai hal itu wajar untuk kita pikirkan di sini. Janganlah perbedaan pendapat ditafsirkan sebagai permusuhan yang negatif.

**Jadi soal perbedaan pendapat itu esensial?**

Ya, memang itu yang paling esensial. Demokrasi justru diciptakan untuk mengatasi perbedaan pendapat. Tapi cara mengatasinya harus damai, *human*, konstitusional, dan tidak berdarah. Sebab konflik *kan* bisa berdarah. Dan kalau setiap konflik diselesaikan dengan darah, masyarakat akan hancur.

**Apa perbedaan pendapat itu karena *generation gap*?**

Ya. Perbedaan pendapat itu memang tidak bisa dihindari. Ada karena perbedaan usia, atau generasi. Masalahnya apakah perbedaan itu dianggap prinsipil, sehingga menghalangi kerja sama atau mengganggu dalam memecahkan masalah di tingkat nasional. Jadi memang diperlukan kedewasaan dan mengembangkan kultur berbeda pendapat secara dewasa.

**Menurut Cak Nur, pilihan kebijakan apa yang harus dikoreksi?**

Tentu ada urutan prioritas. Saya setuju dengan pendapat mantan Gubernur Lemhanas, Letjen (Purn.) Sayidiman, bahwa UU mengenai kepartaian harus diubah. Karena membuat masyarakat jadi tertutup. Kedua, UU mengenai pemilihan umum harus diubah.

Sebenarnya ide penyederhanaan partai itu bagus. Kita tidak mau energi habis untuk ngurus partai yang tidak terkendalikan jumlahnya, seperti tahun 1950-an. Dan penyederhanaan partai itu bisa ditempuh secara demokratis. Jadi tidak seperti UU sistem kepartaian sekarang ini, di mana ada pembatasan dua partai dan

satu Golkar. Tapi terlebih dulu harus diatur mekanisme di mana nanti partai yang muncul bisa 2 atau 3.

### **Bisa memberi contoh?**

Misalnya, pencalonan presiden Amerika, sebelumnya ada banyak calon yang bermunculan. Tapi kemudian setelah dikristalisasi hanya ada dua dari partai dan satu calon dari independen. *Nah*, agar kualitas para pemimpin kita bisa seperti itu, sebetulnya kita bisa memakai sistem distrik. Sayangnya ide sistem distrik yang dimunculkan dalam seminar Angkatan Darat Kedua, yang kemudian ditentang sendiri oleh kalangan partai, karena bertenangan dengan *vested interest* mereka.

Menentang itu bukan karena visi tentang perlunya pembangunan politik. *Nah*, dengan sistem distrik ini, wakil rakyat punya kewajiban moral untuk mewakili daerah pemilihnya. Sekarang *kan* nggak jelas kualitas wakil rakyat kita. Ini akibat mereka dipilih oleh pusat, sehingga jangan heran jika mereka menjadi semena-mena, dan banyak ditemukan keganjilan-keganjilan.

### **Ide Anda untuk memperbaiki?**

Sistem pengangkatan anggota DPR/MPR harus ditinjau kembali. Taruhlah UUD memang menganut asas adanya perwakilan dari golongan ahli. Tapi pengangkatan itu harus bisa meyakinkan daerah yang diwakilinya. Jadi tidak bisa pengangkatan itu dititipkan dari atas. Memang dulu ada kekhawatiran pengangkatan diperlukan untuk menepis kemungkinan adanya perubahan ideologi negara.

Tapi sekarang kondisinya sudah berubah drastis, dan tidak relevan mengajukan kekhawatiran ideologi seperti masa lalu. Selain itu, kebebasan pers harus diberikan, termasuk diberi kesempatan berdirinya partai oposisi. Karena *trend*-nya keterbukaan, maka Golkar pun harus diakui sama sebagai partai politik seperti PPP dan PDI. Jadi tidak boleh lagi ada pengistimewaan di dalam kehidupan politik.

**Apa artinya perlu melegitimasi PPP dan PDI sebagai partai oposisi?**

Ya betul. Tapi juga bisa bukan PPP dan PDI yang menjadi partai oposisi. Yakni kalau sistem kepartaiannya diubah terlebih dahulu, nanti akan muncul suatu kekuatan politik baru dalam wujud partai oposisi.

**Berati ada perubahan format politik?**

Ya. Dan *nggak* apa-apa. *Toh* ada tiga atau empat partai politik nantinya. Tapi yang jelas bukan partai yang jumlahnya tidak bisa dikendalikan. Kita *nggak* perlu banyak partai. Sebab boros dan tidak ekonomis. Cuma masalahnya berdirinya partai oposisi ini, apakah melalui legitimasi formal atau melalui proses. *Nah*, yang bagus kalau penyederhanaan melalui proses *kan* lebih demokratis, dinamis, dan lebih representatif. Kalau itu terjadi kita akan punya wakil rakyat yang pas kepada *constitunce*-nya.

**PPP dan PDI menolak disebut partai opsosisi. Bagaimana ini?**

Ya. Saya tahu itu. Sebab perkataan oposisi itu masih begitu menghantui dan traumatik. Wajar saja kita merasa khawatir dengan akibat-akibat negatif yang proposional. Sebetulnya ini kesalahan kita sendiri yang tidak mendidik rakyat secara realistis. Kita harus menciptakan suasana di mana kehadiran partai oposisi itu wajar-wajar saja.

**Apakah munculnya partai oposisi, karena ada masyarakat yang tidak terwakili?**

Oh jelas dong. Golongan Putih *kan* fenomena munculnya suara masyarakat yang tidak tertampung di dalam partai politik yang ada saat ini. Sekarang ini Golput masih kecil karena memang

dihurangi, tapi kalau diberi keleluasan bergerak, Golput jelas akan cepat membesar. Padahal modus Golput itu ada benarnya. Yakni memilih untuk tidak memilih.

### **Apa urgensinya kehadiran partai oposisi?**

Urgensinya di dalam demokrasi itu ada mekanisme *check and balance*, pengawasan dan pengimbangan. *Nah*, mekanisme itu tidak akan efektif bila tak ada pengakuan resmi tentang adanya partai oposisi. Jadi partai oposisi itu wujud dari pengakuan adanya perbedaan pandangan, itu sah dan tidak usah khawatir bahwa partai oposisi itu akan menggulingkan pemerintahan.

### **Kenapa?**

Karena kita menganut UUD '45, di mana pemerintah itu tidak bisa dijatuhkan. Pemerintah mempunyai periode masa jabatan selama lima tahun. *Nah*, sebelum datang masa lima tahun yang dibutuhkan, sampai saat ada pemerintah yang baru hasil pemilu, pemerintah yang lama tidak bisa dijatuhkan.

Kita menganut sistem UUD '45 dengan sistem presidensial. Sistem itu sebenarnya meniru Amerika, di mana presidennya tidak bisa dijatuhkan kecuali karena faktor pelanggaran yang serius. Presiden Nixon, misalnya. Sepanjang perjalanan Amerika, baru Nixon yang terkena pelanggaran berat. Jadi tidak seperti di India di mana oposisinya hanya bertujuan menjatuhkan pemerintah. Juga di Pakistan, atau di negeri-negeri Eropa Barat seperti Inggris.

### **Prediksi Anda partai oposisi itu kapan bisa terlaksana?**

Dari sekarang harus mulai dirintis. Misalnya PPP dan PDI harus berani mengatakan bahwa karena kita bukan partai yang memerintah, jadi kita namanya partai oposisi. Dan sikap itu diwujudkan dalam berbagai tindakan dan kebijaksanaan politik

partainya. Jadi sikap politik itu tidak hanya menentang, tapi juga setuju.

Di Amerika saja, *beleid* dari Partai Republik terkadang didukung Presiden dari Partai Demokrat. Atau sebaliknya. Jadi tidak berarti kehadiran partai oposisi itu identik dengan menentang terus. Tapi yang terpenting adalah ada sikap kritis dan *reasoning*-nya setuju atau tidak dengan kebijakan pemerintah. Jangan bisanya cuma kebulatan tekad saja. Butek.

**Adakah landasan konstitusional berdirinya partai oposisi?**

Saya pikir ada. Itu *kan* cuma masalah penerjemahan dari beberapa ketentuan di dalam konstitusi.

**Apa syaratnya?**

Ya terlebih dulu harus dengan mengubah undang-undang sistem kepartaian dan UU mengenai pemilu. Jadi saya sangat setuju sekali dengan ide Sayidiman bahwa kita sekarang memerlukan deregulasi politik.

**Tetapi ada yang tetap ingin mempertahankan agar Golkar dalam posisi sebagai *single majority*?**

Kita memang sejauh ini bicara dari kondisi ideal. Tapi dari segi praktis untuk jangka waktu yang lama, mungkin keinginan untuk mempunyai sistem perpolitikan yang mengenal *single majority*. Partai Kongres di India, atau LDP di Jepang pun begitu, sejak zaman Mc Arthur yang sekarang hancur.

Jadi artinya gagasan *single majority* itu tidak unik Indonesia. Tapi akan beda, apakah sistem itu mengenal oposisi atau tidak. Di Jepang meski LDP selalu berkuasa tetapi tetap partai oposisinya hidup betul dan tidak pura-pura. Karena itu, LDP sekurang-

kurangnya merasa, bahwa partai tidak bisa menjalankan politik semaunya, karena ada partai oposisi yang mengontrolnya.

Ini terlihat ketika sudah sekian lamanya berkuasa, kebobrokan LDP pada akhirnya bisa dibongkar oleh partai oposisi. *Nah*, kalau tidak ada partai oposisi, kemungkinan terbongkarnya kebobrokan di tubuh LDP kecil.

### Sejauh mana kendala kepemimpinan paternalistik?

Ya jelas soal paternalisme selalu disebut-sebut ketika orang membicarakan kemungkinan berdirinya partai oposisi itu. Tapi *kan* model-model kepemimpinan paternalistik bukan khas Indonesia saja. Di Jepang sendiri, faktor senioritas tetap memegang peranan penting.

Jelas itu merupakan bagian dari kultur politik yang harus kita perhitungkan. Tapi menurut saya, hal itu tidak perlu menjadi penghalang yang tidak teratasi. Buktinya Jepang sendiri meski tetap paternalistik, *toh* demokrasi tetap berjalan.

### Apa Petisi 50 atau Forum Demokrasi bisa menjadi Partai Oposisi?

Bisa saja. Dan itu sesuai dengan apa yang dikatakan Sayidiman tentang deregulasi politik. Tapi yang penting harus diciptakan mekanisme yang wajar dan terbuka guna menuju proses kristalisasi. Jadi bukan Petisi 50, Forum Demokrasi membuat partai sendiri-sendiri. Dan tidak mustahil juga nanti, ada orang Petisi 50 atau Forum Demokrasi yang masuk ke PPP dan PDI. Jadi ide dasar partai oposisi itu, *check and balance*.

### Apa tanpa partai oposisi mekanisme *check and balance* itu tidak bekerja?

Oh jelas. Memang ada unsur lain yang bekerja seperti kalangan akademisi, pers dengan kebebasan persnya. Tapi itu unsur-unsur



yang akan membentuk mekanisme *check and balance*. Padahal secara formal yang paling penting ialah partai oposisi. Dan kita masih perlu mengetes sejauh mana partai oposisi itu bisa bekerja dalam sistem yang paternalistik seperti sekarang ini.

**Anggapan rakyat tentang partai oposisi masih bernada negatif. Bagaimana komentar Anda?**

Karena itulah PPP dan PDI pun segan disebut partai oposisi. Karena efek di bawah. Tapi kalau rakyat terus-menerus ditakuti dengan citra partai oposisi, kapan rakyat kita bisa dewasa untuk berdemokrasi. Padahal hakekat PPP dan PDI, tidak masuk di dalam posisi pemerintahan, itu *kan* namanya oposisi.

**Apa yang pantas dikritik untuk Pak Harto?**

Yang jelas jangan pribadinya. Di Amerika saja ada beda antara mengkritik (*to criticize*) dan menghina (*to insult*). Mengkritik itu selalu baik dan menghina itu jahat dan bisa dituntut. Sayangnya, sering kita tidak bisa membedakan kedua hal itu. Jadi kita harus mulai belajar. Dan demokrasi *kan* tidak langsung jatuh dari langit. Demokrasi itu harus melalui proses belajar dan pengalaman. Termasuk kita harus belajar untuk mengkritik dan menerima kritik. Jangan salah kalau ada pejabat yang dikritik nanti mengira dihina.

**Jadi persoalannya terletak pada penafsiran peran dwi fungsi ABRI dalam masyarakat yang lebih terbuka?**

Ya betul. Jadi semua itu mempunyai efek kepada penyiapan kita untuk mengalami suksesi secara damai, konstitusional dan lancar. Dan juga untuk menyadarkan masyarakat kita, bahwa kita tidak perlu lagi ada figur yang dominan sebagai Bapak Bangsa.

Bangsa Indonesia sudah 48 tahun merdeka, dan hidup di bawah dominasi Bapak Bangsa. *Pertama* di bawah Bung Karno, dan *kedua* Pak Harto.

Kalau kita mau jujur, hampir semua persoalan itu diselesaikan oleh satu orang. Meskipun ada *state* dan panggung-panggung seperti DPR/MPR, tapi sebetulnya penyelesaian terakhir secara prinsipil dilakukan oleh satu orang. Memang itu tidak ada salahnya dan setiap bangsa pernah melalui hal itu. Nah kalau nanti terjadi suksesi, kita belum pernah bisa membuktikan tanpa Bapak Bangsa ini bisa atau tidak kita melaluinya.

## Kenapa?

Pemimpin itu yang pertama di antara yang sama (*the first among the equals*). Nah, kalau prinsip itu tidak kita kembangkan dalam mekanisme berdemokrasi dengan institusi politik yang sehat, kedewasaan berbeda pendapat, maka kemungkinan terjadinya percekocokan (*quarrel*) di antara orang yang sama akan tidak terhindari. Karena kita selalu tergantung kepada Bapak Bangsa. Jadi intinya jangan sampai kehidupan berbangsa kita tergantung kepada satu orang saja. [❖]